

mengimplementasikan hukum Islam. Khalifah juga merupakan pemimpin tertinggi dalam negara Islam yang memimpin serta mengatur segala urusan politik atau pemerintahan, dan lembaga-lembaga lain dalam sistem *khilāfah* berada di bawah wewenangnya.

Persamaan lain juga terlihat dari adanya kemiripan nama dan tugas dari beberapa lembaga dalam struktur kekhalifahan Hizbut Tahrir dan ISIS, diantaranya:

- a. Majelis umat/majelis syuro. Lembaga yang terbilang hampir sama antara struktur *khilāfah* versi Hizbut Tahrir dan ISIS dalam penguraiannya adalah majelis umat, atau majelis permusyawaratan. Majelis umat dipilih oleh masyarakat yang tugasnya adalah untuk mengontrol, mengoreksi dan memberikan masukan kepada pemerintah. Bila khalifah meminta pertimbangan dari majelis umat untuk mengambil keputusan atau kebijakan yang bersifat praktis, seperti masalah kesehatan, pendidikan dan ekonomi, maka khalifah wajib terikat dengan keputusannya.
- b. Baitul mal. Persamaan lain adalah lembaga baitul mal yang sama-sama bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan tabungan negara, baik berupa pemasukan atau pengeluaran harta negara, serta dikontrol langsung oleh khalifah.
- c. Wali. Baik *khilāfah* Hizbut Tahrir dan ISIS, di setiap provinsi dipimpin oleh seorang wali yang diangkat langsung oleh khalifah serta bertugas mengatur segala urusan dan memenuhi kebutuhan rakyat yang ada di wilayah tersebut.

Dalam *khilāfah* perspektif Hizbut Tahrir misalnya, untuk menangani segala kebutuhan serta kesejahteraan rakyat, seperti masalah pendidikan, pengobatan atau kesehatan, lapangan pekerjaan dan masalah pertanian berada di bawah tanggung jawab satu lembaga pemerintahan, yakni lembaga *mashalih an-nas* (pelayanan rakyat). Sedangkan dalam *khilāfah* ISIS, untuk menangani dan mengurus kepentingan-kepentingan umum tersebut, ISIS membentuk departemen-departemen khusus yang mereka sebut dengan *diwan*. Ada *diwan al-ta'lim* yang bertanggung jawab di bidang pendidikan, untuk mengurus segala permasalahan di bidang kesehatan merupakan tugas dari *diwan as-shihah*, dan ada *diwan al-zirā'ah* yang bertugas mengelola pertanian dan peternakan.

Perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada pembantu khalifah. Bagi Hizbut Tahrir, seorang khalifah mempunyai pembantu dalam mengurus tugas-tugas kenegaraan dan administrasi yang disebut dengan *mu'āwin*. Seorang khalifah mengangkat wakilnya untuk mengurus tugas kenegaraan yang tugasnya itu sama dengan tugas khalifah, yang oleh An-Nabhani disebut dengan *mu'āwin tafwīdl*. Dalam menjalankan tugas-tugas operasionalnya, juga dibantu oleh *mu'āwin tanfidz*. Jadi, *mu'āwin tanfidz* adalah pembantu yang diangkat oleh khalifah untuk membantunya dalam masalah operasional dan selalu menyertai khalifah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dia juga seorang protokoler yang menjadi penghubung antara khalifah dengan rakyatnya, dan antara khalifah dengan negara-negara lain.

Sehingga, perjuangan Hizbut Tahrir dan ISIS untuk menegakkan kembali *khilāfah Islāmiyah* yang hendak diberlakukan bagi seluruh umat Muslim di dunia sebenarnya hanya akan menabrak tatanan sistem politik yang sudah mapan di setiap negara di dunia. Hal tersebut juga dapat mengacaukan konsep negara bangsa yang kini telah tertata rapi. Tidak mengherankan jika Hizbut Tahrir di tolak di beberapa negara dan bahkan hampir semua negara di dunia telah menentang keberadaan ISIS – termasuk juga menentang setiap upaya menegakkan kembali sistem *khilāfah Islāmiyah* – karena dianggap sebagai ancaman nyata terhadap tatanan kehidupan negara yang sudah berjalan dan akan menyebabkan instabilitas politik di negara tersebut.

Lebih jauh lagi, fakta sejarah peradaban Islam juga memperlihatkan betapa sulitnya menyatukan umat Muslim dalam satu kepemimpinan dengan sistem *khilāfah Islāmiyah*. Sebagai contoh, pada saat Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai Gubernur Damaskus, ia pernah menunjukkan pembangkangannya (tidak mengakui) terhadap kekhalifahan Ali bin Abi Tholib. Ia berkata, “Wahai Ali, Anda jangan salah sangka, Islam sekarang tidak hanya berada di kota Mekkah dan kota Madinah, tetapi Islam saat ini sudah menyebar di berbagai daerah.”¹⁹

Kenyataan tersebut membuktikan bahwa untuk menyatukan umat Islam dengan satu sistem politik, yakni berupa *khilāfah Islāmiyah*, di masa klasik saja sangat sulit, apalagi di masa kini ketika umat Islam di seluruh dunia sudah terpecah ke berbagai negara dengan sistem politik pemerintahan dan karakter

¹⁹ Imam As-Suyuthi, *Tarikh Al-Khulafa: Ensiklopedia Pemimpin Umat Islam dari Abu Bakar Hingga Mutawakkil* (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2010), 154.

pemimpin yang sangat beragam. Seluruh umat Muslim di dunia juga telah tersebar ke berbagai benua seperti Asia, Australia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Dalam kondisi demikian, tentu sangat mustahil menegakkan sistem politik dalam bentuk *khilāfah Islāmīyah* yang nantinya diberlakukan kepada seluruh umat Muslim di dunia.

Utopianisme *khilāfah Islāmīyah* juga terletak pada kenyataan bahwa kaum Muslim di sejumlah kawasan telah mengadopsi konsep negara-bangsa berdasarkan realitas bangsa dengan tradisi sosial, budaya dan agama, wilayah geografis, dan pengalaman historis berbeda. Oleh karena itu, "unifikasi" seluruh wilayah dunia Muslim di bawah kekuasaan politik tunggal dengan sistem *khilāfah Islāmīyah* adalah sebuah bentuk kemustahilan yang tidak bisa diterima oleh nalar rasional.²⁰

Konsep *khilāfah Islāmīyah*, baik yang diperjuangkan secara damai seperti Hizbut Tahrir atau dengan mengangkat senjata seperti halnya ISIS, sama-sama tidak mendapat tempat di Indonesia. Pasalnya, mengganti NKRI dengan sistem *khilāfah Islāmīyah* hanya akan mengingkari sekaligus merugikan cita-cita para *founding fathers* Negara Indonesia. NKRI, dengan Pancasila sebagai ideologinya dan UUD 1945 sebagai dasar hukumnya, merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Sedangkan dalam konsep *khilāfah Islāmīyah* baik menurut Hizbut Tahrir atau ISIS menganggap Pancasila sebagai sistem kufur dan *thaghut*. Mereka juga menganggap bahwa segala sumber hukum buatan manusia tidak sesuai syariat dan harus diganti dengan hukum yang bersumber langsung dari Allah.

²⁰ Reno Muhammad, *ISIS: Kebidaban Konspirasi Global* (Jakarta: Noura Books, 2014), 70.

